

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
TAHUN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Januari Tahun dua ribu delapan belas bertempat di Hotel Grand Mercure Jl. Sutomo No. 1 Medan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, atas nama :

1. Calon Gubernur :

EDY RAHMAYADI

2. Calon Wakil Gubernur :

MUSA RAJEKSHAH

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Utara.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Provinsi Sumatera Utara

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MULIA BANUREA, S.Ag, M.Si	Ketua	
2.	YULHASNI, SS, M.Si	Anggota	
3.	NAZIR SALIM MANIK, S.Sos, M.SP	Anggota	
4.	Ir. BENGET SILITONGA	Anggota	
5.	DR. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Si	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 atas :

Nama Bakal Calon Gubernur :

EDY RAHMAYADI

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur :

MUSA RAJEKSHAH

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET
		HASIL ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK					
1	Model B.4 KWK-Parpol	√		√	
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran		√	√	
CALON DARI PERSEORANGAN					
1	Model B.3 KWK-Persorangan				

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR : EDY RAHMAYADI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN			KET	
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT		TIDAK MEMENUHI SYARAT
1.	Model BB.1 KWK	√			√	NIK di BB.1-KWK belum sesuai dengan NIK di E-KTP
2.	Model BB.2 KWK	√			√	NIK di BB.2-KWK belum sesuai dengan NIK di E-KTP dan penulisan Bulan Lahir tidak sesuai dengan E-KTP
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√		√		
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara: a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana					

	penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan						
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap						
7.	Dalam hal baka) Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak: a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya. c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap						
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara				√	√	√
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah /tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya				√	√	√
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi				√	√	Belum Menyerahkan Dokumen Tanda Terima Asli

11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√	√	√	√	
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	√	√	√	√	
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota	√	√	√	√	
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	√	√	√	√	
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	√	√	√	√	Pada Formulir BB.2 KWK, Calon mencantumkan pendidikan Akademi Militer namun Belum dilengkapi fotocopy ijazah Akademi Militer yang dilegalisir
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon	√	√	√	√	
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	√	√	√	√	Belum sesuai dengan Formulir Model BC.1-KWK
18.	Foto Terbaru	√	√	√	√	

	<p>a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</p> <p>b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar</p> <p>c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar</p>	√	√	√	√	Belum Ada
	<p>d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c</p>	√			√	<p>1. Softcopy Pasfoto Hitam Putih Ukuran 4 x 6 cm belum ada.</p> <p>2. Softcopy Foto Ukuran 4R belum berpasangan sesuai dengan Surat Edaran KPU RI No. 17 Tahun 2018</p>

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Catatan :

1. Surat Keputusan Pemberhentian dari TNI dari Pejabat Berwenang dan salinannya diserahkan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pasal 69 ayat (1).

2. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan, Saudara Edy Rahmayadi dinyatakan **Memenuhi Syarat**.



2. CALON WAKIL GUBERNUR : MUSA RAJEKSHAH

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK	√			√	Tahun Lahir di BB.1 – KWK belum sesuai dengan Tahun Lahir di E-KTP
2.	Model BB.2 KWK	√			√	Tahun Lahir di BB.2 – KWK belum sesuai dengan Tahun Lahir di E-KTP
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Acch, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√		√		
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara: a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal					

	<p>pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p> <p>b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>							
7.	<p>Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:</p> <p>a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional</p> <p>b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.</p> <p>c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan</p> <p>d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas</p> <p>e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>							
8.	<p>Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:</p> <p>a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara persorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>	√	√	√				Surat Keterangan belum Dikeuarkan Pengadilan Negeri Sesuai Domisili
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah /tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya	√					√	1. Dokumen Asli SKCK belum Ada

						2. Peruntukan isi SKCK belum sesuai 3. SKCK belum di tanda tangani oleh Direktur Intelkam Poldasu sesuai Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi	√			√	Belum Menyerahkan Dokumen Asli Tanda Terima
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	√		√		
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	√		√		
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	√		√		
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	√		√		
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	√		√		
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	√		√		
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	√		√		

	Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan	√		√		Belum Sesuai dengan Formulir Model BC.1- KWK
17.						
18.	Foto Terbaru			√		
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√		√		
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	√		√		
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	√		√		Pasfoto Ukuran 4R belum berpasangan sesuai dengan Surat Edaran KPU RI No. 17 Tahun 2018
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c	√		√		Softcopy Pasfoto Ukuran 4R belum berpasangan sesuai dengan Surat Edaran KPU RI No. 17 Tahun 2018
Keterangan : *) Pilih salah satu.						
Catatan: Berdasarkan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan, Saudara Musa Rajekshah dinyatakan Memenuhi Syarat.						

Medan, 17 Januari 2018



Yang Menyerahkan
Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara

Yang Menerima
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)
(Signature)

(Musa Banurea, S.Ag, M.Si)